



## LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN

DISUSUN OLEH :  
ROBY SELAN, S.SOS.  
SNDH : 24

PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVIII  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2020





# IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

## STRATEGI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

### I. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Dalam mendukung terlaksananya proyek perubahan “Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan”, diawali dengan menggerakkan staf, bekerja sama lintas Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pro aktif menyelesaikan dokumen standar pelayanan penyusunan Produk Perda Inisiatif DPRD.

Melakukan koordinasi, komunikasi bersama stakeholder terkait dalam penyempurnaan dokumen standar pelayanan penyusunan Produk Perda Inisiatif DPRD.

Adapun Proyek Perubahan yang dimaksud merupakan terjemahan dari program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dilaksanakan dan dievaluasi sejauhmana tingkat keberhasilannya nanti.

#### a. Nama Proyek Perubahan :

Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pembentukann Perda Inisiatif DPRD.

#### b. Nama Program :

Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pembuatan dokumen standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD.

#### c. Nama Kegiatan :

- Konsultasi dengan Mentor
- Rapat pembentukan Tim Efektif
- Fasilitasi rapat - rapat pengumpulan data
- Fasilitasi rapat pembuatan rancangan dan penetapan draf standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Rapat finalisasi pedoman fasilitasi Sekretariat DPRD berupa standar pelayanan penyusunan produk perda inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Penyediaan layanan publik terhadap dokumen standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan.

d. Indikator Keberhasilan :

Indikator keberhasilan proyek perubahan diukur dari capaian output pelaksanaan kegiatan jangka pendek, yang telah terverifikasi 100% yaitu terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pembuatan dokumen standar pelayanan penyusunan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan data yang terverifikasi adalah :

- Daftar hadir dan laporan proses rapat pembentukan Tim efektif, penerbitan Surat Keputusan Sekretaris DPRD terkait Pembentukan Tim Efektif dimaksud.
- Daftar hadir rapat-rapat, dokumentasi foto, laporan proses pembuatan draf sampai dengan finalisasi dokumen standar pelayanan penyusunan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan'
- Ada menu berupa Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Penyusunan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Ada laporan Implementasi, Monitoring, dan evaluasi dari Proyek Perubahan.

e. Ruang Lingkup Perubahan

Ruang lingkup perubahan dari proyek perubahan adalah : Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu merubah mainset Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk mengoptimalkan kegiatan kerja Bapemperda dalam melaksanakan tahapan pembahasan Perda Inisiatif DPRD, terutama penyusunan dokumen standar pelayanan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## II. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD sebagai Institusi Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menunjang kinerja DPRD. Oleh karenanya, tata kelola dan manajemen yang kuat dalam suatu organisasi sekretariat menjadi sebuah keharusan dan mutlak adanya.

Peran maksimal Sekretariat DPRD menjadi sangat penting dalam memastikan pembahasan kebijakan di DPRD yang berkualitas. Sekretariat DPRD melalui staf yang ditugaskan berdasarkan fungsi masing - masing seharusnya bekerja secara optimal dalam menunjang ketersediaan dokumen dan data pendukung lainnya saat DPRD melakukan pembahasan terhadap sesuatu kebijakan. Dan ini dapat terwujud bila staf Sekretariat DPRD memahami secara substansi dokumen pendukung yang dibutuhkan DPRD dalam memperkuat suatu kebijakan.

Sekretariat DPRD harus mampu mengendalikan dan melakukan penataan terhadap seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan perkantoran dalam bentuk standar operasional prosedur sehingga semua pihak yang bersinggungan dengan Sekretariat DPRD mendapatkan kepastian dalam pelayanan optimal.

Tugas Sekretariat DPRD dan jajarannya yang membedakan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya adalah memberikan dukungan terhadap kelancaran trifungsi DPRD yaitu Fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi / Pembentukan Perda, Fungsi Pengawasan serta penyelenggaraan tugas rutin sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mewujudkan semangat dan prinsip Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Timor Tengah

Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b. Fungsi

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan membawahi 4 (empat) Bagian dan 10 (sepuluh) Sub Bagian yaitu :

- Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian terdiri dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; Sub Bagian Humas dan Protokol.
- Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari: Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan; Sub bagian Pelaporan.
- Bagian Legislasi terdiri dari: Sub Bagian Perundang Undangan; Sub Bagian Rapat dan Risalah.
- Bagian Persidangan terdiri dari: Sub Bagian Fasilitasi Pembahasan Anggaran; Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD dan Pengawasan.

Salah satu penjabaran tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah (Fungsi Legislasi DPRD) setidaknya memiliki Dokumen Standar Pelayanan Penyusunan Produk Perda Inisiatif DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1. Strategi pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kondisi saat ini (masalah): Belum adanya dokumen standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD pada Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

Inovasi yang diinginkan: Dengan adanya dokumen standar pelayanan Penyusunan produk Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang selama ini belum tertuang dalam program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, diharapkan dapat memotivasi pegawai Sekretariat DPRD untuk memberikan pelayanan yang baik dan benar.

2. Pembayaran biaya kegiatan – kegiatan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang cepat, aman, tuntas, dan akuntabel.

Kondisi saat ini (masalah): Pembayaran biaya kegiatan kerja DPRD sebagai pertanggung jawaban belum menunjukkan kinerja program dan kegiatan DPRD, yang ada hanya pertanggung jawaban administrasi keuangan.

Inovasi yang diinginkan: Pembayaran biaya kegiatan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang cepat, aman, tuntas dan akuntabel melalui sistem pertanggung jawaban administrasi keuangan dan pertanggung jawaban administrasi program dan kegiatan kepada pengelola keuangan Sekretariat DPRD.

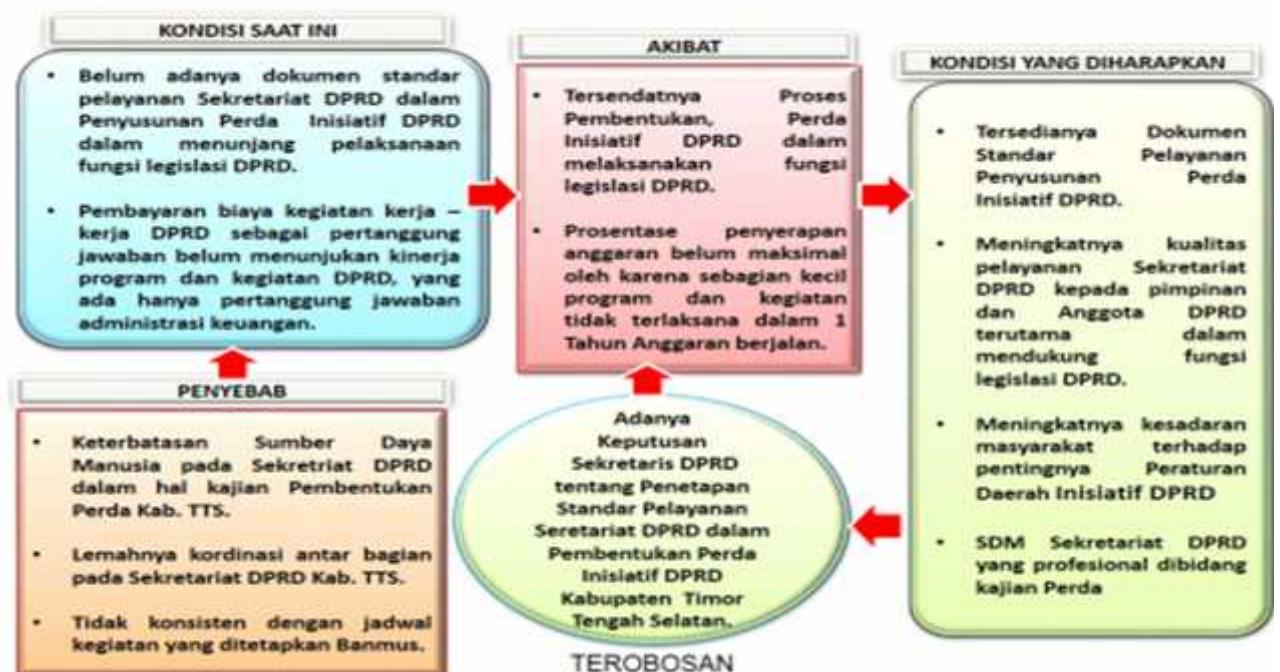
Dari kedua masalah dan inovasi yang diharapkan tersebut di atas, masalah strategi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap fungsi legislasi DPRD adalah masalah yang bersifat strategis yang harus mendapat perhatian serius; dengan demikian dalam proses pembangunan daerah, Project Leader dan Mentor tergerak untuk mengkaji masalah ini dengan solusi pemecahannya adalah membuat dokumen standar pelayanan penyusunan Perda Inisiatif DPRD pada Sekretariat DPRD sekaligus merupakan sumbangsih saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai hasil kerja DPRD selama satu tahun masa jabatan, maka judul yang dipilih Reformer sebagai Proyek Perubahan adalah: "STRATEGI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM PENYUSUNAN PERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN'.

Berikut disampaikan data Program Legislasi daerah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.  
Program Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Tahun 2014 – 2019

No.	Tahun	Rancangan Peraturan Daerah			Peraturan Daerah		
		Inisiatif	Eksekutif	Jlh	Inisiatif	Eksekutif	Jlh.
1	Tahun 2014	3	12	15	-	8	8
2	Tahun 2015	3	31	34	-	13	13
3	Tahun 2016	3	15	18	-	6	6
4	Tahun 2017	3	12	15	1	13	14
5	Tahun 2018	2	6	9	-	6	6
6	Tahun 2019	1	7	11	-	-	-
TOTAL				91		47	

Gambar 1: Analisis Kesenjangan



Dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah, selain dapat diajukan oleh eksekutif, tetapi dapat diajukan DPRD.

Penggunaan hak inisiatif DPRD secara efektif merupakan keharusan untuk mewujudkan fungsi-fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekaligus mendorong tumbuhnya demokrasi di daerah.

DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi sumber inisiatif, ide, dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah karena merekalah yang seharusnya mengetahui secara tepat kebutuhan dan keinginan masyarakat (hak inisiatif).

Namun dalam kenyataan sebagian besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mandul dalam menggunakan hak inisiatif. Disinilah Reformer dan Mentor menyepakati pembuatan Proyek Perubahan, agar kiranya dapat memberikan kontribusi penyelesaian isu yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan program fasilitasi sekretariat DPRD dalam penyusunan dokumen standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD terwujud.

Area gagasan dalam proyek perubahan ini adalah Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam pembentukan perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan hasil akhir adalah dokumen standar pelayanan Penyusunan Produk Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### III. TUJUAN DAN MANFAAT ORGANISASI ADAKTIF

#### A. Tujuan Untuk Organisasi Adaptif

##### 1. Tujuan Untuk Jangka Panjang

Meningkatnya kinerja DPRD dalam menghasilkan produk Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

##### 2. Tujuan Jangka Menengah

Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berjalan dengan lancar.

##### 3. Tujuan Jangka Pendek

Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### B. Manfaat Untuk Organisasi Adaptif

Dengan terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pembuatan dokumen standar pelayanan penyusunan produk Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hasil akhirnya berupa

tersedianya Dokumen standar pelayanan penyusunan produk Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, maka manfaatnya adalah:

1. Dari segi proses, mengajarkan kepada Sekretariat DPRD bentuk fasilitasi yang baik dan benar dalam pembentukan Perda Inisiatif DPRD.
2. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai dokumen standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD untuk dijadikan referensi sekaligus sebagai dasar dalam proses tahapan pembahasan Perda Inisiatif DPRD kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Untuk Masyarakat dapat menerima layanan publik informasi Perda Inisiatif DPRD yang tersaji dalam bentuk dokumen dan layanan website Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan.

#### IV. OUTPUT DAN OUTCOME

##### A. OUTPUT

Output yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah:

1. Output Jangka Panjang adalah :
  - 1.1. Terciptanya prosedur yang terarah, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah.
  - 1.2. Memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pekerjaan bagi Anggota DPRD, Sekretariat DPRD maupun Pemerintah Daerah.
  - 1.3. Terlaksananya program kerja DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - 1.4. Tersedianya layanan publik dan terdistribusinya Produk Perda inisiatif DPRD kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - 1.5. Tersusunya laporan monitoring dan evaluasi Proyek Perubahan secara berkala.
2. Output Jangka Menengah adalah :
  - 2.1. Adanya hasil finalisasi draft dokumen standar pelayanan Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- 2.2. Adanya dokumen standar pelayanan pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - 2.3. Adanya Laporan hasil sosialisasi tentang dokumen standar pelayanan pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Output Jangka Pendek adalah :
    - 3.1. Adanya Tim Efektif
    - 3.2. Adanya pedoman kerja penyusunan standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
    - 3.3. Adanya draf dokumen standar pelayanan pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## B. OUTCOME

Outcome dari proyek perubahan Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat mewujudkan:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terutama dalam menunjang fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Meningkatnya Kinerja DPRD dalam mengasilkkan Perda Inisiatif DPRD bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk Peraturan Daerah Inisiatif DPRD bagi pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## V. TAHAPAN PERUBAHAN STRATEGIS

### A. Mandat Kebijakan

Aspek pengetahuan yang harus diketahui dan dipahami Sekretaris DPRD bersama jajaran staf Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi pembentukan Perda DRD antara lain:

1. Dasar hukum pembentukan Perda (fungsi legislasi) DPRD
  - 1.1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan kedua atas undang – Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 1.2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
- 1.3. Peratutran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah;
- 1.5. Peratruran Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota;
- 1.6. Peraturan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 1.7. Surat Pimpinan DPRD Nomor DPRD.172.6 / 388 / 3 / 2018, tanggal 21 Desember 2018, Perihal Usulan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2019.

## 2. Makna fungsi pembentukan Perda (fungsi legislasi) DPRD

- 2.1. Fungsi untuk membentuk Perda bersama Kepala Daerah ( DPRD sebagai Policy Maker dan Kepala Daerah sebagai Policy Implementation )
- 2.2. Fungsi strategis yang menempatkan DPRD sebagai “Lembaga Terhormat” dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
- 2.3. Merupakan fungsi perjuangan untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah.
- 2.4. Merupakan suatu proses untuk mengakomodir berbagai kepentingan para pihak / stakeholder.

## B. Visi Perubahan

Visi Proyek Perubahan Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah “Terwujudnya

pelayanan prima Sekretariat DPRD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menunjang fungsi pembentukan Perda Inisiatif DPRD (fungsi legislasi DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

Makna yang terkandung dari Visi tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Variabel terwujudnya “pelayanan prima” mengandung arti pelayanan terbaik atau sangat baik sesuai standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD
- b. Variabel “Efektif” diartikan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya guna pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Variabel “Efisien” diartikan penggunaan sumber daya Sekretariat DPRD secara minimal guna hasil yang optimal
- d. Variabel “transparan” diartikan terbetuknya akses bagi seluruh masyarakat terhadap informasi terkait dengan kegiatan pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD melalui suatu manajemen system informasi publik.
- e. Variabel “Akuntabel” mengandung arti bahwa setiap pelaksanaan tugas kesekretariatan, seluruh jajaran Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terukur dalam menunjang fungsi legislasi DPRD.

### C. Analisis Lingkungan Strategis

Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

1. Dilakukan diskusi secara mendalam ( Focus Group Discussion / FGD ) dengan melibatkan stakeholder Internal dan Eksternal, maka permasalahan dianggap paling strategis dan nantinya diharapkan mampu memberikan dampak keberlanjutan dan memberikan manfaat pada organisasi, yaitu: Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk mengekspresikan dari isu strategis tersebut, kemudian dibahas lagi agar isu strategisnya lebih fokus dan mengarah pada pemantapan. Adapun alasan dipilihnya isu strategis tersebut yaitu :

- 1). Belum adanya standar pelayanan penyusunan produk Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 2). Belum adanya produk Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dihasilkan hingga saat ini.
- 3). Tersendatnya proses pembentukan perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### D. Milestone ( Tahapan ) Pelaksanaan Proyek Perubahan

Milestone ( Tahapan ) dalam mewujudkan tujuan proyek perubahan dan kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek perubahan, dilakukan dengan tahapan capaian indikator output jangka pendek, terukur, terverifikasi, keterlibatan stakeholder, resiko dan asumsi dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.  
Pertahapan Jangka Pendek

PERTAHAPAN JANGKA PENDEK			
NO.	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1.	Konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyampaian rencana Proyek Perubahan pada Mentor dan Coach.	- Kesepakatan area perubahan; - Dokumentasi kegiatan.	Minggu ke 2 s/d Minggu ke 4 Bulan September Tahun 2020
2.	- Rapat koordinasi dan persiapan Teknis Proyek Perubahan bersama stakeholder internal Sekretariat DPRD. - Pembuatan SK Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan.	- Daftar Hadir; - Notulen Rapat; - Dokumentasi Kegiatan. - Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan.	
3.	Rapat Persiapan dan penjadwalan rencana sosialisasi Proyek Perubahan bersama Tim Efektif.	- Undangan; - Daftar Hadir; - Notulen Rapat; - Dokumentasi Kegiatan.	
4.	Sosialisasi Proyek Perubahan (Stakeholder Eksternal).	- Undangan; - Daftar Hadir; - Notulen Rapat; - Dokumentasi Kegiatan; - Laporan Kegiatan Sosialisasi.	

5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pembuatan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> <li>- Konsolidasi Stakeholder eksternal ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat dukungan Organisasi Perangkat daerah sebagai stakeholder terkait</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan.</li> </ul>	<p>Minggu ke 4 Bulan Oktober s/d Minggu ke 2 Bulan Nopember Tahun 2020</p>
----	--	---	--

Tabel 3  
Pertahapan Jangka Menengah

NO.	PERTAHAPAN JANGKA MENENGAH		
	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1.	Rapat penetapan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan;</li> <li>- Daftar Hadir;</li> <li>- Notulen Rapat;</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan.</li> <li>- Laporan Kegiatan Sosialisasi</li> </ul>	Minggu ke 2 Bulan Nopember Tahun 2020
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan Proyek Perubahan</li> <li>- Penyusunan bahan tayangan dan print Laporan Proyek Perubahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerangka Laporan Laporan Proyek perubahan;</li> <li>- Power point;</li> <li>- Print out Laporan Proyek perubahan.</li> </ul>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjilidan laporan Proyek Perubahan</li> <li>- Laporan kepada Bupati Timor Tengah Selatan paska implementasi Proyek Perubahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Kegiatan.</li> </ul>	Minggu ke 3 Bulan Nopember Tahun 2020

Tabel 4  
Pertahapan Jangka Menengah

PERTAHAPAN JANGKA PANJANG			
NO.	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU

1.	Adanya kerja efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya prosedur yang terarah, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD sebagai bagian dari</li> <li>- pembangunan hukum daerah.</li> <li>- Memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pekerjaan bagi Anggota DPRD, Sekretariat DPRD maupun Pemerintah Daerah.</li> <li>- Terlaksananya program kerja DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> </ul>	Tahun 2020 s/d Tahun 2021
----	--	--	---------------------------

Tabel 5  
Pertahanan Jangka Panjang (Lanjutan)

PERTAHANAPAN JANGKA PANJANG			
NO.	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
2.	Adanya layanan publik Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan publik terhadap akses Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> <li>- Tersedianya layanan publik dan terdistribusinya Produk Perda inisiatif DPRD kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> </ul>	Tahun 2020 s/d Tahun 2021
3.	Evaluasi dan Laporan Implementasi Proyek Perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat evaluasi implementasi terhadap proyek perubahan.</li> <li>- Penyusunan Laporan Proyek Perubahan.</li> <li>- Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Perubahan secara berkala.</li> </ul>	

## VI. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

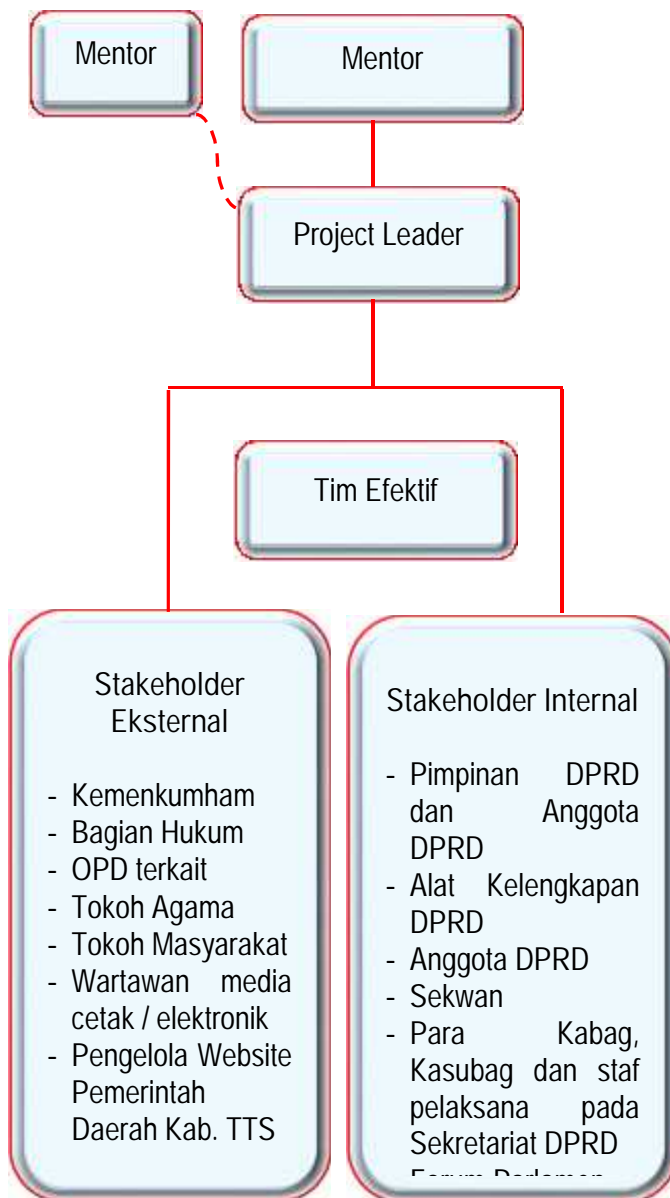
### A. Peta / Struktur Stakeholder

Proyek Perubahan ini merupakan kegiatan institusional Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, adapun stakeholder yang terkait dalam kegiatan perubahan ini adalah:

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian Administrasi Umum membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas
  - Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
3. Kepala Bagian Legislasi membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Perundang - Undangan
  - Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
4. Kepala Bagian Persidangan membawahi
  - Kepala Sub Bagian Fasilitas Pembahasan Anggaran
  - Kepala Sub Bagian Fasilitas Alat Kelengkapan Daerah
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Pelaporan
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan

Adapun Peta / struktur stakeholder pada Proyek Perubahan “Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan” adalah:

Gambar 2  
Peta Stakeholder



**Mentor**

Memberikan dukungan arahan bimbingan dan petunjuk kepada Project Leader dalam proses pengerjaan Proyek Perubahan.

**Coach**

Memberikan arah, monitoring dan evaluasi kepada Project Leader sesuai kontrak kerja Proyek Perubahan.

**Project Leader**

- Menerima dukungan, arahan, bimbingan dan petunjuk dari Mentor, agar semangat dalam mengerjakan Proyek Perubahan;
- Menerima bimbingan dari Coach agar bekerja sesuai kontrak kerja Proyek Perubahan;
- Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan Tim Kerja dalam penyelesaian Proyek Perubahan.

**Tim Efektif**

Dengan dukungan stakeholder, dan Tim Efektif, Project Leader dapat berkoordinasi dan berkolaborasi menyelesaikan proyek Perubahan sesuai dengan milestone yang dibuat.

**B. Identifikasi Stakeholder**

Pihak – pihak yang berperan, berpengaruh, serta berkepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan Proyek Perubahan Strategi Pelayanan Sekretariat

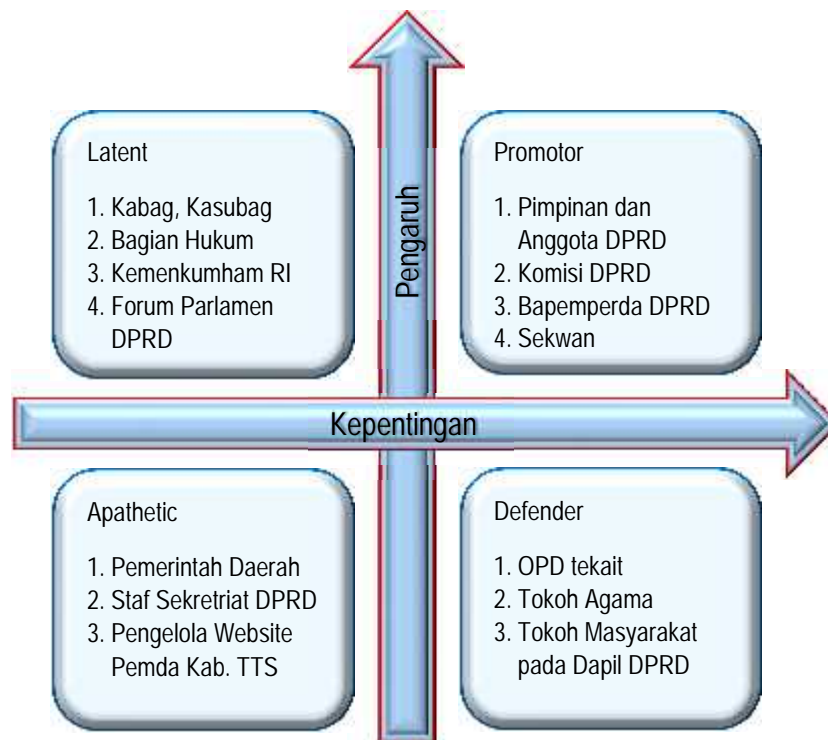
DPRD dalam penyusunan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung adalah:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan: Peran yang harus dilakukan Pimpinan DPRD melalui rapat memberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada setiap Anggota DPRD agar memberi saran, pendapat serta bahan dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang bersumber dari Reses, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta rapat – rapat Komisi dengan Mitra Kerja OPD.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terutama Bapemperda dan 4 (empat) Komisi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan: Peran Ketua dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerahnya merupakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah. Bentuk dukungan adalah persetujuan bersama yang dibahas ditingkat Banggar DPRD.
3. Forum Parlemen: Peran forum parlemen adalah forum yang membantu Bapemperda dan Sekretariat DPRD dalam menghimpun data base terhadap sebuah rancangan Perda Inisiatif DPRD yang diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang - undang yang berlaku.
4. Bagian Hukum setda kabupaten Timor Tengah Selatan: Peran dan pengaruhnya adalah memberikan telaahan hukum terhadap Ranperda Inisiatif DPRD.
5. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Nusa Tenggara Timur: Peran dan pengaruhnya adalah melakukan harmonisasi Ranperda Inisiatif DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Para Kabag dan Kasubag lingkup Sekretriati DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan: Peran dan pengaruhnya adalah terlibat dalam penyusunan pembuatan pedoman fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD.

7. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Peranan dan pengaruhnya adalah menerima layanan publik produk Perda Inisiatif DPRD dan sebagai kontrol terhadap kinerja DPRD KabupatenTTS.
8. Wartawan lokal: Peran dan pengaruhnya adalah memberitakan dan melakukan pengawasan publik terhadap kinerja DPRD Kabupaten TTS.

C. Analisis Stakeholder dan Strategi Komunikasi

Gambar 3  
Gambar Analisis Peta stakeholder



Komunikasi secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan penyampaian suatu gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Untuk itu, pada tabel di bawah ini diuraikan komunikasi yang dilakukan Project Leader terhadap stakeholder.

Pengertian komunikasi stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat baik individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi dan issue / permasalahan yang sedang

diangkat. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia, arti stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.

Tabel 6  
Strategi komunikasi

Kelompok Stakeholder	Strategi Komunikasi
Promotors	<p>Kelompok yang memiliki kepentingan terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuat berhasil dan sebaliknya strategi komunikasi yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi dengan memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat perlu dan berguna.</li> <li>b. Hal – hal yang dikomunikasikan adalah dengan menyampaikan maksud, tujuan, manfaat, output yang dihasilkan serta impact dari proyek perubahan</li> <li>c. Meminta dukungan dan motivasi terutama untuk penganggaran tahun depan.</li> </ol>
Latens	<p>Kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program tapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka tertarik strategi komunikasi yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun komunikasi dengan memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, manfaat, dan output yang dihasilkan.</li> <li>b. Memperlakukan mereka dengan baik.</li> </ol>
Defenders	<p>Kelompok yang memiliki kepentingan dan menyuarakan dukungan tapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tupoksi dan merupakan ajang pembuktian diri dan kemampuan.</li> <li>b. Mengajak bersemangat dan memberikan motivasi untuk keberhasilan proyek perubahan.</li> </ol>
Apatheics	<p>Kelompok yang tidak memiliki kepentingan dan kekuatan terhadap program yang dilaksanakan. Memberi informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat dalam proyek perubahan.</p>

## D. Identifikasi Masalah

Tabel 7  
Identifikasi Permasalahan

No	Identifikasi Pihak yang Berkepentingan	Jenis Produk yang dihasilkan
1.	Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Pimpinan dan Anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.	Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## E. Strategi dan pendekatan Marketing Sektor Publik

Strategi merupakan cara atau siasat, yang berhubungan dengan setiap upaya pengambilan keputusan dengan memperhitungkan setiap kemungkinan yang diperkirakan terjadi, guna mencapai tujuan yang diharapkan, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang meliputi koordinasi dan sinergi, penetapan indikator keberhasilan penyusunan rencana dan sasaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, keberhasilan strategi yang digunakan akan direplikasi pada rencana aksi periode selanjutnya, sedangkan beberapa indikator kegiatan akan dievaluasi dan di-update sesuai dengan permasalahannya.

Adapun strategi marketing sektor publik yang digunakan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini adalah:

### 1. Customer

Customer yang harus diberi pelayanan adalah:

- Pimpinan dan Anggota DPRD secara langsung menyampaikan hal – hal yang terkait dengan urgensinya proyek perubahan.
- Seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan cara sosialisasi dengan menyampaikan kepada Bupati tentang hasil dokumen standar pelayanan Sekretariat DPRD dalam pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Staf Sekretariat DPRD dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan TOT.

2. Palace

Untuk melaksanakan program kegiatan yang telah dirancang tersebut, dipilih metode penyampaian yang simple, efektif dan efisien serta tepat waktu. Beberapa metode yang dianggap relevan yakni Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Price

Biaya yang digunakan pada proyek perubahan ini dibebankan pada fasilitasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Produk

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Promotion

Agar proyek perubahan ini terselenggara dengan baik dan berdampak pada manfaat dan kinerja organisasi, maka untuk memberikan pemahaman dilakukan dengan metode yang berbeda disesuaikan dengan stakeholder antara lain Sosialisasi Perda Inisiatif DPRD melalui media cetak maupun media elektronik (website).

VII. KENDALA, RESIKO

Tabel 8  
Kendala, resiko

NO.	Kendala Internal	Resiko	Keterangan
1.	Tim Efektif	Tumpang tindihnya pekerjaan antara rutin dengan area perubahan.	Semuanya prioritas yang pelaksanaannya berbarengan waktu dalam rangka pelayanan.
2.	Anggota Tim Efektif.	Pemahaman atas pekerjaan belum optimal.	Motivasi rendah.
3.	Koordinasi dengan stakeholder.	Lebih mengutamakan Tupoksi Organisasi.	Pelaksanaan tidak optimal.
4.	Kegiatan area perubahan tidak dianggarkan.	Tidak masuk pada APBD dan APBD Perubahan.	Mencari dana talangan pribadi tau melakukan APBD Perubahan.
5.	Pelaksanaan area perubahan hanya 2 (dua) bulan.	Tanpa waktu yang terkurus dalam melaksanakan kegiatan semacam target pencapaian.	Hasil pekerjaan belum berdampak positif bagi pengembangan organisasi karena masih terkait dengan stakeholder.

## VIII. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Perencanaan tahapan kegiatan proyek perubahan “Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan,” telah dibuat Milestone (pertahapan) pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yakni:

### 1. Pertahapan Jangka Pendek :

- Konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyampaian rencana proyek perubahan pada Mentor dan Coach dengan outputnya sebagai berikut :
  - Kesepakatan area perubahan;
  - Dokumentasi kegiatan.
- Rapat koordinasi dan persiapan teknis Proyek Perubahan bersama stakeholder internal Sekretariat DPRD dengan outputnya sebagai berikut :
  - Undangan;
  - Daftar Hadir;
  - Notulen Rapat;
  - Dokumentasi Kegiatan.
  - Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Efektif
- Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan dengan outputnya sebagai berikut :

Draf Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;

  - Undangan;
  - Daftar Hadir;
  - Notulen Rapat;
  - Dokumentasi Kegiatan.
- Rapat persiapan dan penjadwalan rencana sosialisasi Proyek Perubahan bersama Tim Efektif dengan outputnya sebagai berikut :
  - Undangan;
  - Daftar Hadir;
  - Notulen Rapat;
  - Dokumentasi Kegiatan;

- Sosialisasi Proyek Perubahan (stakeholder Internal dan Eksternal) dengan outputnya sebagai berikut :
  - Undangan;
  - Daftar Hadir;
  - Notulen Rapat;
  - Dokumentasi Kegiatan;
- Proses pembuatan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten TTS dan Konsolidasi stakeholder eksternal ke seluruh OPD terkait dengan outputnya sebagai berikut :
  - Surat Dukungan Organisasi Perangkat Daerah sebagai stakeholder terkait;
  - Dokumentasi kegiatan.

2. Pertahapan Jangka Menengah :

- a. Penetapan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan outputnya sebagai berikut :
  - Undangan;
  - Daftar Hadir;
  - Notulen Rapat;
  - Dokumentasi Kegiatan.
  - Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Penetapan Standar Pelayanan sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- b. Menyusun Laporan Proyek Perubahan dan Penyusunan bahan tayangan, dan print out laporan Proyek Perubahan dengan outputnya sebagai berikut :
  - Kerangka laporan Proyek perubahan;
  - Power point;
  - Print out laporan Proyek perubahan;
- c. Penjilidan Laporan Proyek Perubahan, dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan paska implementasi Proyek Perubahan dengan outputnya sebagai berikut :
  - Dokumentasi Kegiatan.

3. Pertahanan jangka panjang :

- a. Adanya kerja efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan outputnya sebagai berikut :
  - Terciptanya prosedur yang terarah, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah.
  - Memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pekerjaan bagi Anggota DPRD, Sekretariat DPRD maupun Pemerintah Daerah.
  - Terlaksananya program kerja DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- b. Adanya layanan publik Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan outputnya sebagai berikut :
  - Penyediaan layanan publik terhadap akses Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - Tersedianya layanan publik dan terdistribusinya Produk Perda inisiatif DPRD kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- c. Evaluasi dan Laporan Implementasi Proyek Perubahan dengan outputnya sebagai berikut :
  - Rapat evaluasi implementasi terhadap proyek perubahan.
  - Penyusunan Laporan Proyek Perubahan.
  - Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Perubahan secara berkala.

## IX. CAKUPAN TAHAPAN STRATEGIS

Cakupan tahapan strategis atas diberlakukannya Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Sekretariat DPRD harus bertanggung jawab (akuntabel) kepada peningkatan kinerja DPRD dalam pembentukan Perda Inisiatif DPRD. Wujud keseriusan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan Area Perubahan Kepemimpinan Tingkat II adalah terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap penyusunan Perda Inisiatif DPRD dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam menghasilkan produk Peraturan Daerah sesuai kebutuhan di Daerah.

Cakupan tahapan strategis proyek perubahan ini, dapat disampaikan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 9  
Cakupan Strategis

Tanggal	Kegiatan	Output	Waktu	Keterangan
17 September Tahun 2020	Konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyampaian rencana proyek perubahan pada Mentor dan Coach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesepakatan area perubahan</li> <li>- Dokumentasi kegiatan</li> </ul>	Minggu ke 3 Bulan September Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disetujui Mentor dan Coach</li> <li>- Diketahui oleh Mentor dan Coach.</li> </ul>
21 September Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi dan persiapan Teknis Proyek Perubahan bersama stakeholder internal Sekretariat DPRD.</li> <li>- Pembuatan SK Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir</li> <li>- Notulen Rapat</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan</li> <li>- Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan</li> </ul>	Minggu ke 3 Bulan September Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disetujui Mentor dan Coach</li> <li>- Terlampir form kegiatan Diketahui oleh Mentor dan Coach</li> </ul>
22 September Tahun 2020	Rapat Persiapan dan penjadwalan rencana sosialisasi Proyek Perubahan bersama Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Daftar Hadir</li> <li>- Notulen Rapat</li> <li>- Materi sosialisasi</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan</li> </ul>	Minggu ke 3 Bulan September Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disetujui Mentor dan Coach</li> </ul>
25 September Tahun 2020	Sosialisasi Proyek Perubahan (Stakeholder Eksternal )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Daftar Hadir</li> <li>- Notulen Rapat</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan</li> <li>- Laporan Kegiatan Sosialisasi</li> </ul>	Minggu ke 3 Bulan September Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan sesuai milestone</li> <li>- Diketahui oleh Mentor dan Coach</li> </ul>
26 Oktober s/d 9 Nopember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pembuatan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan.</li> <li>- Konsolidasi Stakeholder eksternal ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Dukungan Organisasi Perangkat Daerah sebagai stakeholder terkait;</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan.</li> </ul>	Minggu ke 4 Bulan Oktober s/d Minggu ke 2 Bulan Nopember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui oleh Mentor dan Coach</li> <li>- Evidence dari pelaksanaan</li> </ul>

Tabel 10  
Cakupan Strategis

Tanggal	Kegiatan	Output	Waktu	Keterangan
10 Nopember Tahun 2020	Penetapan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Daftar Hadir</li> <li>- Notulen Rapat</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan</li> <li>- Laporan Kegiatan Sosialisasi SK Sekretaris DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> </ul>	Minggu ke 2 Bulan Nopember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui oleh Mentor dan Coach</li> <li>- Evidence dari pelaksanaan</li> </ul>
11 Nopember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Laporan Proyek Perubahan.</li> <li>- Penyusunan bahan tayangan dan print Laporan Proyek Perubahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerangka Laporan Proyek Perubahan;</li> <li>- Power point;</li> <li>- Print out Laporan Proyek Perubahan.</li> </ul>	Minggu ke 1 Bulan Nopember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui oleh Mentor dan Coach</li> <li>- Evidence dari pelaksanaan</li> </ul>
20 Nopember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjilidan Laporan Proyek Perubahan.</li> <li>- Laporan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan paska Implementasi Proyek Perubahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Kegiatan.</li> </ul>	Minggu ke 3 Bulan Nopember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui oleh Mentor dan Coach</li> <li>- Evidence dari pelaksanaan</li> </ul>
Tahun 2020 s/d Tahun 2021	Adanya kerja efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya prosedur yang terarah, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah.</li> <li>- Memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pekerjaan bagi Anggota DPRD, Sekretariat DPRD maupun Pemerintah Daerah.</li> <li>- Terlaksananya program kerja DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> </ul>	Tahun 2020 s/d Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disetujui Mentor dan Coach</li> <li>- Evidence dari pelaksanaan</li> </ul>

Tabel 11  
Cakupan Strategis

Tanggal	Kegiatan	Output	Waktu	Keterangan
Tahun 2020 s/d Tahun 2021	Adanya layanan publik Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan publik terhadap akses Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> <li>- Tersedianya layanan publik dan terdistribusinya Produk Perda inisiatif DPRD kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> </ul>	Tahun 2020 s/d Tahun 2021	Telah disetujui Mentor dan Coach - Evidence dari pelaksanaan
Tahun 2020 s/d Tahun 2021	Evaluasi dan Laporan Implementasi Proyek Perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat evaluasi implementasi terhadap proyek perubahan.</li> <li>- Penyusunan Laporan Proyek Perubahan.</li> <li>- Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Perubahan secara berkala.</li> </ul>	Tahun 2020 s/d Tahun 2021	Telah disetujui Mentor dan Coach - Evidence dari pelaksanaan

#### X. LESSON LEARNT INDIVIDU

Implementasi Visitasi Kepemimpinan Nasional di Pekon Sumbermulyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pembelajaran yang dapat diambil adalah:

1. Tekad, kemauan yang tinggi serta kerja keras masyarakat penggerak UMKM dalam menopang kehidupan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Potensi Sumber Daya Alam yang memadai merupakan factor pendukung dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus ditunjang kesiapan Sumber Daya Manusia yang handal serta dukungan Manajemen yang professional.
3. Peningkatan jaringan komunikasi lintas sektor merupakan dukungan bagi tercapainya tujuan organisasi secara berjenjang.
4. Kebutuhan penting dari pembangunan infrastruktur penunjang pengintegrasian untuk menjadi Kawasan Desa Wisata di era industry 4.0.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dalam menghasilkan produk kerajinan unggulan dan olahan makanan merupakan point penting dalam rangka eko-green dan ekowisata menuju desa wisata andalan.

## XI. POTENSI DAN KENDALA

### A. Potensi

1. Tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung Bapemperda.
2. Dukungan Stekholder yang memadai.

### B. Solusi

1. Meyakinkan kepada Tim kerja efektif dan stakeholder bahwa apa yang dilakukan Organisasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan proyek perubahan dari belum adanya dokumen standar atau pedoman yang baku tentang standar pelayanan Sekretariat DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Melalui Pimpinan DPRD meminta kepada Bapemperda untuk memberi dukungan optimal kepada Sekretariat DPRD dan Tim Efektif dalam penyediaan instrument data pendukung dalam penyusunan dokumen standar pelayanan Sekretariat DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## XII. P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

Dalam Proyek perubahan Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka project leader menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya proyek perubahan ini project leader berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD lebih khusus mendukung Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga

sangat ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap tiap - tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3. Sekretariat DPRD, merupakan salah satu bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses demokrasi lokal.

## B. SARAN

1. Dokumen Standar Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan telah tersusun dan harus secara konsisten dilakukan update / pembaharuan sesuai perkembangan.
2. Agar diterapkan teknik evaluasi dan analisa terhadap produk Peraturan Perundang - Undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## CATATAN PERBAIKAN PROYEK PERUBAHAN

Hasil seminar Rancangan Proyek Perubahan “Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan” yang dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2020, yang dihadiri Mentor, Coach dan Penguji.

Adapun catatan perbaikan adalah :

1. Pada judul mengalami perubahan yakni awalnya kalimat “Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan” mengalami perubahan sesuai saran Penguji sebagai berikut : “Strategi Pelayanan”. Sehingga menjadi : “ Strategi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.”
2. Pada tujuan rancangan proyek perubahan mengalami perubahan pada :
  - a. Tujuan Jangka Panjang sebelumnya tertulis :
    - Terprogramnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam penyusunan dokumen standar pelayanan sebagai telaahan produk perda inisiatif DPRD kab. TTS.
    - Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislative sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Mengalami perubahan yakni strep datar 1 dan 2 didrop dan diganti dengan “Meningkatnya kinerja DPRD dalam menghasilkan produk perda inisiatif”.
  - b. Tujuan jangka menengah sebelumnya tertulis :

Standar pelayanan sebagai telaahan produk rancangan perda inisiatif DPRD kabupaten Timor Tengah Selatan; Kemudian didrop diganti dengan : “Penyusunan perda inisiatif DPRD kabupaten Timor Tengah Selatan berjalan lancar”.
  - c. Jangka panjang sebelumnya tertulis  
Terlaksananya fasilitasi sekretariat DPRD dalam penyusunan dokumen standar pelayanan sebagai telaahan produk perda inisiatif DPRD kabupaten TTS; kemudian didrop diganti dengan : “Terlaksananya fasilitasi Sekertariat DPRD terhadap penyusunan perda inisiatif DPRD”.
3. Outputnya perlu dirubah dan ditambahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Widjaja H. A.W. 2005, Penyelenggara Otonomi di Indonesia PT Rajagrafindo Persada Cetakan ke-4.
2. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan> Daerah di Indonesia Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016.
3. [www.basicproject.or.id/Polici](http://www.basicproject.or.id/Polici) Brief Penguatan Kapasitas Sekretariat DPRD diakses pada April 2016.
4. Sejumlah Materi Pembelajaran PKN TK II Angkatan VIII Tahun 2020 LAN RI dan BPSDM Sumatera Selatan.

Peraturan Perundang – Undangan / Peraturan Daerah / Peraturan Bupati.

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 ayat (2) Afan Gafar, Syakani, Ryas Rasyid. Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan halaman 20.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan LAN RI No. 2 Tahun 2019, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.